KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

ERG6|2|1

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

	M.									
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 3 9 6 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan						
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG										
A.1 NPWP : 1 4 6 3 1 1 0 7 1 7 2 2 0 0 0										
A.2 NIK :										
A.3 Nama : RUTH DEASY NIA EVALINDA										
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG										
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJA (Rp)	ΑK	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3		B.4		B.5	B.6	B.7		
2 21-402-01			994.300	994.3	00	0	5	49.715		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen										
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : C.2 Nama Instansi Pemerintah :				9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
C.3 ID Subunit Organisasi :										
C.4 Tanggal :		2 3	2 3 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy							
C.5 Nam	5.5 Nama Penandatangan :		HARI	HARI JUMADI						
				Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
				Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.						